



An Interpretive and Critical Paradigm Study of the “Gerakan Ekonomi Benteng” in Indonesia

Reny Y. Sinaga

Staff pada Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah, Pandan, Indonesia. Email:
sinagarenyy@gmail.com

Abstract

Program Ekonomi Gerakan Benteng di Indonesia yang pernah diselenggarakan pada masa Kabinet Natsir bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi baru di Indonesia agar tidak berat sebelah atau timpang. Namun berbagai upaya tersebut tidak membuahkan hasil, disamping sangat memberatkan keuangan negara. Dibutuhkan telaah paradigmatic agar gagasan dan program ini dapat sejalan mulai dari tingkat abstraknya (filsafat) sampai dengan prakteknya. Berdasarkan kebenaran ilmu dari paradigma interpretive, gerakan ekonomi benteng ini akan berhasil dilaksanakan bila program-programnya dapat memenuhi postulat kecukupan. Dalam arti lain, program tersebut dapat dijelaskan kepada semua lapisan kalangan pengusaha nasional dan dapat dipahami serta dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Kemudian berdasarkan pemahaman tentang ilmu dari paradigma critical, gerakan ekonomi ini akan berhasil dilaksanakan bila program-programnya ditempatkan di antara objektivisme dan subjektivisme, yang didalamnya juga mengandung pendekatan operasi dan eksploitasi agar para pengusaha Indonesia jangan menganggap bahwa seolah-olah bantuan pemerintah tersebut adalah untuk konsumsi pribadi.

Keywords: *Paradigma Interpretive Paradigma Critical, Gerakan Ekonomi Benteng*

A. PENDAHULUAN

Program Ekonomi Gerakan Benteng yang diselenggarakan pada masa Kabinet Natsir ini digagas oleh Soemitro Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan pada saat itu) bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi baru di Indonesia yang dirasakan berat sebelah atau timpang karena masih cenderung mengedepankan kepentingan pengusaha asing. Sistem ekonomi tersebut merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan merubah struktur ekonomi nasional (Detikedu, 2022). Namun, upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, disamping memang memberatkan keuangan pemerintah. Gagalnya pelaksanaan ekonomi Gerakan Benteng ini perlu ditelaah secara paradigmatic agar gagasan dan program ini dapat sejalan mulai dari tingkat abstraknya (filsafat) sampai dengan prakteknya.

B. METODE

Mengingat rumusan permasalahan ini memadai dijawab dengan mempergunakan telaah paradigmatic, maka studi ini memadai mempergunakan telaah paradigma interpretive dan critical. Paradigma sangat memadai dipergunakan dalam

suatu penelitian, karena memberikan penjelasan tentang apa yang hendak dilakukan oleh peneliti, dan apa saja yang masuk dalam dan di luar batas-batas penelitian yang valid (Denzin & Lincoln, 2009). Dalam konteks yang lebih praktis, paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, masalah-masalah apa yang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya, serta pola atau aturan apa saja yang harus diikuti dalam rangka menjawab masalah tersebut.

Paradigma interpretive dan critical dalam studi ini didasarkan pada pemikiran Neuman dan Sarantakos. Neuman mendefinisikan paradigma sebagai keseluruhan sistem berpikir yang mencakup asumsi dasar, pentingnya pertanyaan yang harus dijawab atau teka-teki yang harus dipecahkan, teknik penelitian yang harus digunakan, dan contoh-contoh penelitian ilmiah yang baik (Neuman, 2016). Neuman (2016) mengklasifikasikan paradigma dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu *positivist social science*; *interpretive social science* dan *critical social science*. Selanjutnya, Sarantakos mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat proposisi yang menjelaskan bagaimana 'dunia' (realitas) dipahami. Paradigma berisi sebuah *worldview*, yaitu sebuah cara untuk menyederhanakan kompleksitas realitas yang nyata dan memberi pedoman kepada para peneliti sosial tentang apa yang penting, apa yang sah, dan apa yang layak (Sarantakos dalam Rahardjo, 2011). Adanya paradigma akan mendasari suatu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari (Ritzer, 2014). Sarantakos membagi 3 (tiga) paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial, yaitu *positivistik*, *interpretative*, dan *kritis*.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Gerakan Ekonomi Benteng

Program ekonomi gerakan banteng merupakan serangkaian upaya pemerintah Republik Indonesia dalam decade pertama semenjak proklamasi kemerdekaan untuk mengubah struktur ekonomi yang dirasakan berat sebelah atau timpang, karena masih cenderung megedepankan kepentingan pengusaha colonial dan asing. Program yang diselenggarakan pada masa kabinet Natsir yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi baru di Indonesia agar pengusaha pribumi mampu bersaing.

Program ini meliputi upaya upaya, seperti menumbuhkan dan membina kelas kalangan pengusaha di kalangan bangsa Indonesia, seraya membangun nasionalisme ekonomi atau "Indonesianisasi", memberi kesempatan kepada para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, membimbing dan memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha importer asing, membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada para pengusaha importer Indonesia, dan memfasilitasi para pengusaha Indonesia untuk secara bertahap berkembang menjadi maju. Namun pada kenyataannya, gerakan ekonomi ini mengalami kegagalan yang antara lain disebabkan tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing di dalam kerangka system ekonomi liberal, masyarakat pribumi/pengusaha pribumi tidak mau mengembangkan usahanya dengan menggunakan metode-metode baru, terdapatnya mentalitas yang cenderung konsumtif dan sangat tergantung pada pemerintah, kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, menyalahgunakan kebijakan kredit pemerintah yang semula diwajibkan untuk digunakan bagi perkembangan usahanya malah dijadikan alat untuk hidup konsumtif, dan ingin segera mendapatkan keuntungan besar dan

menikmati gaya hidup mewah. Padahal persaingan yang terjadi dalam pasar bebas dapat menang dikarenakan kemampuan mengembangkan usaha.

b. Telaah Paradigmatik terhadap Gerakan Ekonomi Benteng

Istilah paradigma dipopulerkan oleh Kuhn (2012) untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan melalui 'pergeseran paradigma secara revolusioner. Menurut Kuhn, paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, dan, sebaliknya, masyarakat sains terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Jika melihat konsep tersebut, maka paradigma dapat diartikan sebagai model atau skema yang mengorganisir pandangan kita tentang suatu hal.

Salah satu paradigma yang dikemukakan oleh Neuman dan Sarantakos adalah paradigma *interpretive*. Adapun peran manusia dalam ilmu dari paradigma *interpretive* adalah menciptakan dunia mereka, berikut sistem maknanya, tidak dibatasi (restricted) oleh hukum-hukum eksternal (Indarti, 2010). Bagi paradigma *interpretive* menurut Sarantakos yang menjadi maksud pengembangan ilmu adalah untuk memahami kehidupan. Artinya ilmu dikembangkan dengan maksud menginterpretasi atau memaknai dunia. Penekanannya pada makna dan pemahaman. Adanya gagasan "pembangunan ekonomi baru di Indonesia" bagi paradigma *interpretive* menurut Sarantakos adalah bagaimana makna dan pemahamannya.

Paradigma *interpretive* memadai dipergunakan dalam menjawab permasalahan kegagalan gerakan ekonomi benteng. Pembangunan ekonomi melalui gerakan benteng bertujuan agar pengusaha pribumi lebih bias menguasai pasar dapat dijadikan salah satu alternative sebenarnya walaupun mengalami kegagalan dikarenakan tidak mempunya bersaing oleh pengusaha itu sendiri. Pada konteks *interpretive* disini dikarenakan posisi nilai mengalami penafsiran yang berbeda beda antara pemerintah dan pengusaha, pengusaha asing memanfaatkan segala kesempatan untuk mencapai target pasar sehingga segala yang menjadi bagian dari usahanya mengalami kemajuan. Adapun pengusaha pribumi, meskipun sudah diberikan kesempatan dengan jalan kredit dan berbagai kebijakan dari pemerintah, namun tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut, karena lupa akan tujuan dari kredit tersebut. Pembangunan ekonomi yang di kembangkan dengan posisi nilai dimaksud sebenarnya adalah kemajuan dalam memunculkan ide dan gagasan namun menjadi gagal dikarenakan oleh factor dari pengusaha pribumi tersebut sendiri. Sehingga, bila berdasarkan kebenaran ilmu dari paradigma *interpretive*, gerakan ekonomi tersebut akan berhasil dilaksanakan bila program-program Ekonomi Gerakan Benteng dapat memenuhi postulat kecukupan, atau dalam arti lain, program tersebut dapat dijelaskan kepada semua lapisan kalangan pengusaha nasional dan dapat dipahami serta dapat diterjemahkan ke dalam tindakan.

Selanjutnya, paradigma *critical* juga telah dikemukakan oleh Neuman dan Sarantakos. Menurut Neuman, paradigma serupa dengan pendekatan maupun tradisi, suatu orientasi dasar terhadap teori dan penelitian, yang merupakan keseluruhan sistem berpikir yang meliputi asumsi dasar, research question, dan berbagai metoda pengumpulan dan analisis data (Indarti, 2010). Menurut Neuman, paradigma *critical* sebagai ilmu merupakan pencerminan dari konflik yang terus berlangsung, yang pada dasarnya dikendalikan oleh berbagai struktur dasar yang tersembunyi (Indarti, 2010) mengingat semua ilmu harus mulai dengan suatu posisi nilai, yang pada dasarnya diantara nilai tersebut terdapat sebagian yang benar dan ada pula sebagian yang salah

(Indarti, 2010). Artinya, setiap ilmu harus dimulai dengan posisi nilai, yang meskipun posisinya ada yang benar dan ada yang salah, namun ilmu harus dikembangkan untuk mengkritik, membongkar kesadaran palsu serta memberdayakan masyarakat agar mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Adapun menurut Guba dan Lincoln, hakikat ilmu menurut paradigma critical theory et.al.adalah Realisme Historis. Artinya ada realitas virtual yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan “gender”, lalu seiring dengan berjalannya waktu terkristalisasi. Artinya, terdapat sejarah yang cukup panjang dan mengkristal.

Hakikat gagasan “pembangunan ekonomi baru di Indonesia” bagi paradigma critical tetap melihat pada adanya realisme historis. Berdasarkan pemahaman tentang ilmu dari paradigma critical tersebut, Gerakan Ekonomi Benteng ini dapat berhasil dilaksanakan bila program-program tersebut ditempatkan di antara objektivisme dan subjektivisme yang didalamnya juga mengandung pendekatan opresi dan eksploitasi agar para pengusaha Indonesia jangan menganggap bahwa seolah-olah bantuan pemerintah tersebut adalah untuk konsumsi pribadi. Adanya paradigma critical ini sangat berperan penting dalam menyingkirkan kemasabodohan dan kesalahpahaman terhadap sistem ekonomi Indonesia saat itu yang berat sebelah atau timpang yang lebih mengedepankan kepentingan pengusaha-pengusaha asing dan juga memiliki sifat-sifat yang cenderung konsumtif dan sangat ketergantungan pada pemerintah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, metode, serta analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa gerakan ekonomi benteng dapat berhasil bila dijalankan secara keilmuan dengan menelaahnya terlebih dahulu secara paradigmatic. Telahh paradigmatic yang dilakukan adalah Paradigma interpretive dan critical. Disarankan agar dalam membuat gerakan dalam pembangunan ekonomi dengan maksud pengembangan ilmu dari paradigma interpretive, Pemerintah mempergunakan kewenangannya melalui penekanan makna terhadap program tersebut dan memberikan pemahaman kepada pengusaha sebagai titik fokus agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Adapun telaah posisi nilai dalam ilmu atas gagasan pembangunan ekonomi baru di Indonesia, paradigma critical mengkritik dan membongkar secara radikal struktur ekonomi kolonial yang dipandang berat sebelah dan sangat timpang dan memberdayakan semua lapisan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Terj: Dariyatno, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detikedu, “Sistem Ekonomi Gerakan Benteng: Tujuan, Pencetus dan Program-program, 24 Nov 2022, available at <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423062/sistem-ekonomi-gerakan-benteng-tujuan-pencetus-dan-program-program>.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Kuhn, Thomas S., 2012, *The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*, Terj: Tjun Surjaman, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Neuman, W. Lawrence, 2016, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Rahardjo, Turnomo, Landasan Filosofis Penelitian Komunikasi, Jurnal Semai Komunikasi, Vol. II No. 1, Desember 2011.
- Ritzer, George, 2014, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj: Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers.